

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEKUATAN MARITIM INDONESIA UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN TAHUN 2020

Dadang Sobar Wirasuta<sup>1</sup>

**Abstract** - Problems of Indonesian maritime force development planning is inseparable from the role of government to support the development of maritime forces. In accordance with geography constellation as the largest archipelago in the world according to UNCLOS 1982, Indonesian economic development currently the largest in Southeast Asia and number 16 in the world with 6.4% gross domestic product (year on year). In this sense, it is time for implementing maritime force development based on maritime perspective and state defense as a whole integrated. Regardless of budget required by the military to implement its vision and mission of defense, the state has to be able to fulfill it and is able to offset foreign policy of the so-called Indo-pacific region in 2020.

**Keywords:** Defense, Maritime Defense, Military Reformation, Military Innovation.

Sesungguhnya ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi keamanan laut di Asia Tenggara pada umumnya maupun Laut Cina Selatan pada khususnya, yaitu :

1. Kepentingan atas kekayaan sumber daya laut dan ZEE (zone ekonomi eksklusif) sebagai konsekuensi hasil dari konvensi hukum laut UNCLOS (*United Nation's Convention on the Law of the Sea*), Tahun 1982.<sup>2</sup>
2. Ada beberapa negara-negara yang belum mengetahui/mengakui atau meratifikasi UNCLOS,
3. Perubahan lingkungan keamanan regional maritim terkait permukaan dan isi dasar lautan yang menjadi perhatian utama.

Laut Cina Selatan adalah kawasan maritim yang merupakan jalur pelayaran paling sibuk di dunia sekaligus menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sejak awal peradaban, Laut Cina Selatan telah berfungsi sebagai jalur pelayaran dan perdagangan terpenting di kawasan. Saat ini, signifikansi geostrategis Laut Cina Selatan semakin kuat

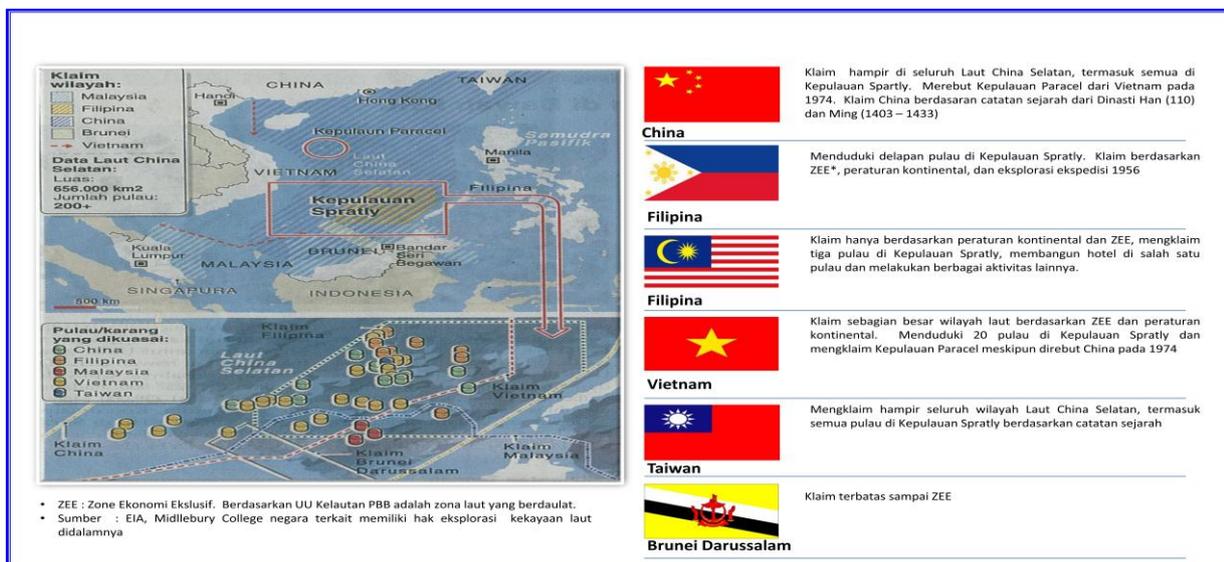
---

<sup>1</sup>Penulis adalah Laksamana Pertama TNI, dengan gelar akademik, Dr.SH.S.Sos.S.Pi.SE.MM.MBA, Doktor Ekonomi 2008 dan jabatan sekarang adalah Sekretaris lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pertahanan Indonesia.

<sup>2</sup> Kresno Buntoro dan Rajab Silitonga, "Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Prospek dan Kendala, (Jakarta: Sekolah Staf dan Komando TNI AL, 2012).

dengan nilai estimasi perdagangan maritim yang bergantung pada keamanan jalur ini sebesar US\$ 5 triliun setiap tahunnya, tiga kali lebih besar dari Terusan Suez. Tidak hanya negara-negara sekitar yang berkepentingan pada jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran di kawasan ini, melainkan juga negara-negara besar seperti Cina, India, Jepang, Korea Selatan, AS, dan lainnya. Kawasan maritim ini juga kaya akan sumber daya alam baik perikanan maupun migas. Setidaknya kawasan ini mengandung 7,5 milyar barel minyak bumi dan 20 triliun kubik gas alam,<sup>3</sup> yang mendorong tingginya intensitas perebutan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya yang ada.

Di sisi lain, kawasan ini diwarnai sengketa kewilayahan yang melibatkan enam negara pengklaim (*claimant states*), yaitu Brunei, Cina, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam dengan dasar klaim yang berbeda satu dengan lainnya. Sengketa di Laut Cina Selatan tidak hanya terbatas pada masalah kedaulatan atas kepemilikan pulau-pulau yang secara garis besar terbagi atas empat kelompok kepulauan besar, yaitu Dongsha (Kepulauan Prata), Xisa (Kepulauan Paracels), Zongsha (*Macclesfield Bank*), Nansha (Kepulauan *Spratly*), serta pulau Huangyan (*Scarborough Reef/Shoal*), tetapi juga bercampur dengan masalah hak-hak berdaulat dan yurisdiksi atas landas kontinen dan ZEE.



**Gambar 1.** Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan

Sumber : Dadang Sobar Wirasuta, Orasi Ilmiah Wisuda Pasca Sarjana Sekolah Kajian Pertahanan Strategi, 2013 oleh Laksamana TNI Dr. Marsetio.

<sup>3</sup> Rokhmin Dahuri, *Kebijakan Kelautan dan Perikanan*, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2005).

Tanpa dapat dihindari akan berdampak bagi Indonesia karena lokasi konflik yang berbatasan dengan wilayah Indonesia. Terutama perbatasan Laut Indonesia dengan 10 negara tetangga, yaitu : India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.

### PERBATASAN LAUT INDONESIA DENGAN 10 NEGARA TETANGGA



**Gambar 2.** Perbatasan Laut Indonesia Dengan 10 Negara Tetangga

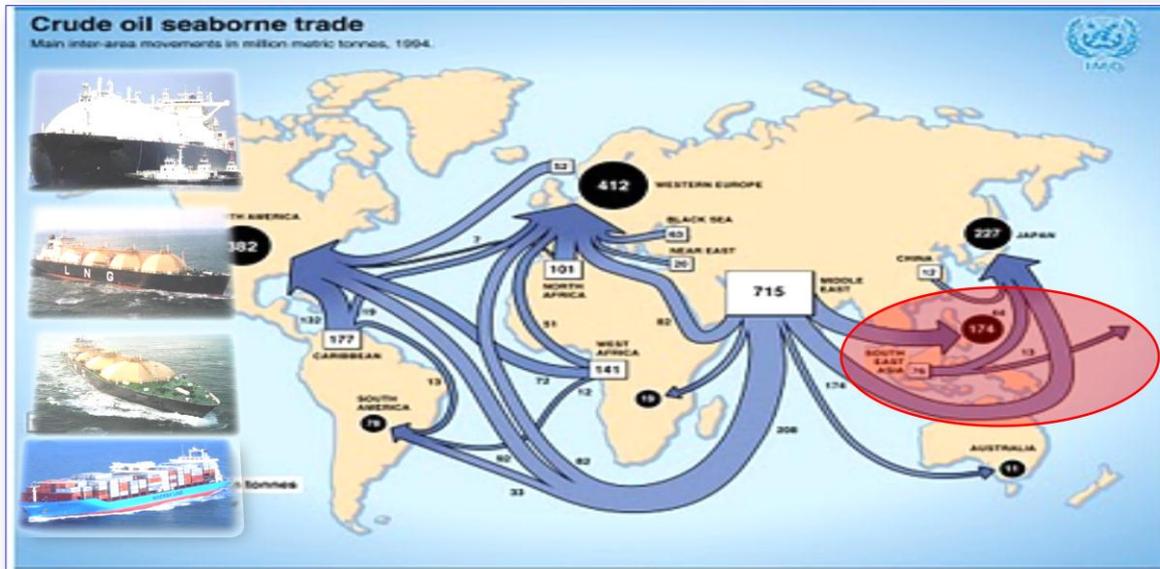
Sumber : Dadang Sobar Wirasuta, Orasi Ilmiah Wisuda Pasca Sarjana Sekolah Kajian Pertahanan Strategi, 2013 oleh Laksamana TNI Dr. Marsetio.

Dampak nyata dari kondisi atas wilayah laut dan batas negara maritim ini, akan mendorong negara-negara kawasan yang berkepentingan untuk mengembangkan kemampuan persenjataan dan mengubah strategi penggelaran kekuatan militernya. Pada kawasannya sendiri, tentunya suatu negara akan menunjukkan kekuatan militer yang utama untuk kemungkinan meramalkan situasi dan kondisi melalui kemampuannya menetapkan visi dan misi pertahanannya dengan negara lain melalui penguasaan teknologi pertahanan laut dan udara yang tinggi.

Pada saat ini, kita tergiring untuk melihat masih adanya kekurangan keamanan maritim di Asia Tenggara atau wilayah regional sekitarnya, sehingga banyak usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerja sama maritim kawasan Asia Tenggara maupun sekitarnya sebagai proses peningkatan kerjasama keamanan maritim. Indonesia dengan konfigurasi geografi lautan dan pulau-pulaunya dengan luas wilayah total sekitar 7,7 juta km<sup>2</sup>, dimana dua per tiga dari luas wilayah tersebut adalah lautan menjadikan ekonomi

jasa perhubungan laut Indonesia diperkirakan mencapai 12 miliar USD/tahun selain 70% produksi minyak dan gas bumi yang berasal dari kawan pesisir dan laut.

### CRUDE OIL SEABORNE TRADE



Gambar 3. Crude Oil Seaborne Trade

Sumber : Dadang Sobar Wirasuta, Orasi Ilmiah Wisuda Pasca Sarjana Sekolah Kajian Pertahanan Strategi, 2013 oleh Laksamana TNI Dr. Marsetio.

Pada saat ini, Indonesia akan mengembangkan visi dan kemampuan untuk memodernisasi Alutsista angkatan laut dan udaranya untuk memaksimalkan pengamanan, penjagaan, dan pengelolaan potensi yang dimiliki. basis pembentukan keamanan di kawasan Asia Tenggara adalah deklarasi “Zona Damai, Kebebasan dan Netralitas di Asia Tenggara (ZOPFAN)” dan “Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama di Asia Tenggara (TAC)”. Keduanya mengungkapkan bahwa anggota ASEAN akan menyelesaikan perselisihan antara satu sama lain secara damai.<sup>4</sup>

Pertanyaannya adalah seberapa jauh basis ZOPFAN dan TAC ini, jika dihadapkan pada masalah sengketa nyata perairan di kawasan, terutama terkait dengan faktor strategis penyebab perang di muka bumi sejak zaman prasejarah sangat terkait erat pada masalah sumber daya & perdagangan (termasuk jalur perdagangan) ?

<sup>4</sup> Mya Than & Carolyn Gates (eds), *ASEAN Enlargement: Impacts and Implications*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2001).

Fakta bahwa hingga saat ini hanya 20% masalah klaim maritim kawasan ini terselesaikan, berarti masih menyisakan 80% yang bermasalah menjadi pekerjaan rumah sendiri. Sesungguhnya Indonesia bersama ASEAN harus mampu menyelesaikan segera klaim perairan wilayah laut tersebut, mengingat wilayah laut kawasan ini juga menjadi daerah persaingan tajam dan strategis bagi negara lain di luar ASEAN, seperti Cina, India, atau AS.<sup>5</sup>

Untuk mengatasi campur tangan global dan menghindari intervensi eksternal di wilayah ini, jelaslah Indonesia dan negara-negara ASEAN harus bertindak kolektif dalam membangun kekuatan gabungan dan posisi tawar yang lebih kuat dalam masalah-masalah politik, pertahanan, dan keamanan. Hal ini sangat dibutuhkan kekuatan diplomasi.

Kekuatan diplomasi harus dapat menjamin kepentingan pembangunan pertahanan yang tidak hanya mendorong upaya untuk penguatan kemampuan tentara yang dipadukan dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas bela negara dari warga negaranya. Hal ini harus dapat menjamin keselamatan dan kehormatan bangsa melalui perwujudan kesepahaman antar negara tetangga.

ASEAN seringkali dipandang semata-mata sebagai 'wadah diskusi' atas berbagai isu di kawasan. Artinya, potensi ASEAN Power yang sesungguhnya besar, dianggap belum optimal digunakan untuk menyelesaikan berbagai sengketa nyata di antara negara-negara anggotanya sendiri, termasuk sengketa klaim wilayah perbatasan laut. Untuk mempertahankan sentralitas di kawasan dan menjadikan organisasi ini semakin penting dalam panggung global, ASEAN jelas perlu lebih terintegrasi, lebih terlibat dalam aspek ekonomi, pertahanan, dan keamanan dengan lebih pro-aktif merespon perubahan lingkungan internasional yang semakin terkait antara satu dengan yang lainnya.

Pemantapan dokumen ASEAN 2015 telah menetapkan berbagai tujuan atas kerja sama ASEAN dan menjadikan kawasan ASEAN pada dekade kedua Millenium (2015) sebagai kawasan yang mampu menjadi wadah kerja sama negara-negara di kawasan untuk hidup dalam perdamaian dan kemakmuran, menyatu dalam kemitraan yang

---

<sup>5</sup> Daniel Kliman & Abe Denmark, "How to Get South Asia Right", *Diplomat*, dalam <http://thediplomat.com/2011/02/02/how-to-get-southeast-asia-right/>, 2 Februari 2011.

dinamis dan menjadi komunitas yang saling peduli serta terintegrasi dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.<sup>8</sup>

Stabilitas dan keamanan kawasan sebagai integrasi kelautan ASEAN dapat diciptakan dengan cara mendorong terciptanya integrasi politik, keamanan dan pertahanan di kawasan. Dengan demikian APSC (*ASEAN Political Security Community*), ADMM (*ASEAN Defense Ministerial Meeting*) dan ADMM Plus dapat digunakan sebagai pilar yang *legitimate* untuk membangun sebuah komunitas keamanan dan pertahanan regional dalam tiap jenjang dan tahapan yang dibutuhkannya. Khususnya dalam 3 pilar utama mencakup : *maritime security*, *energy security* dan *food security* serta berbagai isu terkait keamanan dan pertahanan kawasan.

ADMM ke-6 tahun 2012 di Kamboja, mengambil tema “*Enhancing ASEAN Unity for Harmonized and Secure Community*” dengan isu yang dibahas antara lain Industri Pertahanan, *Peace Keeping Center Network Counter Terrorism* dan Laut Cina Selatan.<sup>6</sup>



**Gambar 4.** Regional Strategic Partnership

Sumber : Dadang Sobar Wirasuta, Orasi Ilmiah Wisuda Pasca Sarjana Sekolah Kajian Pertahanan Strategi, 2013 oleh Laksamana TNI Dr. Marsetio.

Karenanya, ASEAN perlu menetapkan upaya-upaya pendalaman (*deepening*) dan perluasan (*widening*). Upaya pendalaman harus lebih difokuskan pada perbaikan internal,

<sup>6</sup> Menhan RI, “Pertemuan ADMM ke 6 di Kamboja”, *Majalah Wira*, Volume 36, No.20, Mei – Juni 2012.

seperti penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih “workable” dan upaya perluasan menuntut ASEAN untuk memaksimalkan potensi APSC bersama mitra bersamanya berdasarkan orientasi *outward-looking security*. Di sisi lain, Indonesia harus mampu menetapkan keinginannya untuk memiliterkan militer-nya (*militarizing the military*) terkait pada prioritas kebijakan keamanan dan pertahanan regional dan dari aspek kebijakan luar negeri dengan cara menghapus keengganan-keengganan dengan alasan tradisional dalam perspektif domestiknya.

Integrasi regional harus lebih difokuskan pada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Indonesia sendiri dengan mengingat kepentingan nasionalnya, dimana salah satu aspek penting adalah isu ketiga di atas dalam konteks regional. Karenanya, transformasi pola pemikir pemimpin dalam merumuskan strategi demi kepentingan masa depan bangsa dengan kemampuan menggiring pandangan “*national interest to regional action*” sekaligus “*regional interest to national action*” jelas sangat dibutuhkan !

Fakta dalam perjalanan 14 tahun terakhir ini, menuntut Indonesia harus mampu memperbaiki rancangan strategi pertahanannya, utamanya untuk membius para prajurit dan perwira TNI untuk cukup berbangga diri dengan digiring menjadi tentara-tentara yang berkonsentrasi pada misi yang diusung SSR (*security sector reform*) 1998. Menjadi tentara yang berkonsentrasi lebih banyak pada misi-misi rekonstruksi (bencana) dan stabilisasi (pasca bencana), tetapi tidak cukup dibangun untuk berkonsentrasi pada misi dan tugas utamanya sebagai militer profesional untuk menghadapi “bencana pertahanan” dihadapan matanya yang mampu untuk mengusir dan meminimalkan ancaman sejak di batas ZEE Indonesia.

Pengembangan strategi pertahanan dapat berawal dari koreksi terhadap 3 hal yaitu: Pertama, persepsi bahwa tidak ada ancaman tradisional dalam kurun waktu ke depan. Kedua, landasan berfikir dan strategi pertahanan yang selalu dibangun di luar konteks isu regional dan internasional. Ketiga, penetapan anggaran pertahanan yang hanya berkiblat pada perbandingan terhadap kekuatan PDB. Padahal, terdapat pendekatan lain dalam memproyeksikan anggaran pertahanan. Misalnya, keinginan untuk melihat dari perspektif keamanan dan pertahanan negara secara utuh terpadu, dimana itu berarti berapapun anggaran yang diperlukan oleh militer untuk visi dan misi pertahanannya, harus mampu diberikan oleh negara. Sehingga pelaksanaannya bukan

*budget oriented*, tetapi *program oriented*. Sesuai dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang meningkat dan mendapat apresiasi dari Pengamat Ekonomi David Samual. Menurutnya, pada kuartal dua 2012, Produk Domestik Bruto (PDB) Cina tumbuh 7,6% dan Indonesia 6,4% (*Year one Year*), sedangkan India menempati posisi kedua dari tumbuh dibawah 6% ke level 5,4%. Ekonomi Indonesia telah tumbuh dengan baik dan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, dan bahkan nomor 16 di dunia.

Isu-isu maritim di perairan Indonesia utamanya terkait pada SLOCs (Sea Lines of Communicatios) dimana selain Selat Malaka, fungsi strategis Selat Sunda, Selat Lombok dan terutama Selat Wetar dan Letti (ada istilah lain : “*the 2<sup>nd</sup> Malacca*”) mungkin malah membutuhkan perhatian lebih serius baik dari kita sendiri maupun negara-negara kawasan. Karena, bagaimanapun dalam perkembangan politik regional, gagasan SLOCs strategis yang tersebar di perairan Indonesia memerlukan strategi yang mencakup keamanan maritim kawasan secara kolektif.

Menurut John Robert Beishline, perencanaan merupakan turunan dari tinjauan yang telah ditetapkan, karena itu dalam membuat perencanaan dibutuhkan pemikiran reflektif (*Reflective Thinking*) yang melibatkan banyak *Stake Holder* dan proses penyusunan harus dengan teliti dan cermat serta menggunakan tahapan-tahapan tertentu.<sup>7</sup>

Kekuatan armada maritim dengan orientasi baru dan jauh melampaui visi dan misi sebatas Armada Barat (Armabar) dan Armada Timur (Armatim) harus segera dibangun untuk menghadapi tantangan 8 tahun mendatang dan mengantisipasi secara serius rencana pergeseran 60% kapal-kapal perang modern militer AS dari seluruh dunia ke kawasan. Pergeseran ini mengikuti orientasi kebijakan politik luar negeri Presiden Obama dan pernyataan tegas Panetta untuk kembalinya AS berkonsentrasi penuh ke kawasan yang disebutnya sebagai *Indo-Pacific* pada 2020.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> John Robert Beishline, *Military Management for National Defense*, (USA : Prentice Hall, 1950).

<sup>8</sup> Obama, Kebijakan Luar Negeri USA, 2012.



**Gambar 5.** Balancing Without Alliance

Sumber :Dadang Sobar Wirasuta, Orasi Ilmiah Wisuda Pasca Sarjana Sekolah Kajian Pertahanan Strategi, 2013 oleh Laksamana TNI Dr. Marsetio.

Artinya, kita harus mampu membaca ancaman konstalasi pertahanan dan keamanan dalam perspektif dinamika politik global dan menyimak bagaimana kekaisaran militer AS semakin tumbuh menuju wujudnya kelak di 8 tahun mendatang. Data resmi dari *US Department of Defense (DoD)* pada laporan struktur tahun fiskal 2003 menyebut, Pentagon memiliki 702 pangkalan di 130 negara dan mengklaim, pangkalannya mencakup 44.870 barak, hanggar, rumah sakit, dan bangunan lain sebanyak lebih dari 4.844 bangunan. Angkatan Lautnya memiliki 11 kapal induk modern, 286 kapal perang berikut kapal selam. Gambaran tersebut membawa kita pada kesadaran bahwa sebenarnya hanya sedikit sekali ruang yang ditinggalkan di planet bumi ini yang tidak terisi oleh kekuatan militer AS. Dan ruang kosong itu adalah wilayah Indonesia terus menuju arah selatan melalui Samudera Hindia ke arah Antartika. Karenanya, kekuatan TNI khususnya TNI AL dan TNI AU ke depan harus bertumpu pada pembangunan kekuatan angkatan laut dan udara yang harus mampu mendukung dua armada AL baru yang harus segera terbentuk. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia membentuk dua armada baru untuk mendukung dua armada yang sudah ada, Armabar dan Armatim. Sebagai ilustrasi, maka armada pertama adalah armada yang berkonsentrasi pada pembangunan kemampuan

pertahanan laut dan udara di sepanjang sisi ZEE Selatan Indonesia, yaitu Armada Samudera Hindia, sementara armada kedua harus mampu berkonsentrasi pada pembangunan kekuatan laut dan udara di sepanjang sisi ZEE Utara Indonesia yakni kawasan Samudera Pasifik.

Untuk itu, Indonesia harus mau berkaca dan belajar secara jujur mengukur bagaimana strategi pembangunan kekuatan pertahanan semasa Soekarno yang mampu memainkan peranan sebagai *'non alignment'* dengan konsekuen dan menjadikan kekuatan militer Indonesia menjadi yang terbesar di bumi bagian selatan dengan kekuatan Angkatan Laut Indonesia yang terdiri dari komposisi 234 kapal perang terdiri dari sebuah kapal penjelajah (*Cruiser*), 12 kapal selam, 7 kapal perusak (*Destroyer*), 7 *fregat* dan beberapa jenis Kapal Perang lain. Kedepan, Indonesia memang tidak boleh lagi lengah dengan selalu mengusung mantra-mantra perdamaian : *"1.000 friends o enemy"*. Sementara di saat yang sama negara-negara lain di depan mata berlomba membangun kekuatannya. Sebab secara logika jika pertahanan negara kuat, perdamaian dalam konteks keberadaan serta kedaulatan nasionalpun akan tercipta. Dampak efek penangkal akan lebih besar apabila kita memiliki armada yang kuat yang memiliki persenjataan yang modern dengan menguasai dan memiliki nuklir.<sup>9</sup>

Sebagai negara maritim terbesar di kawasan, jelaslah Indonesia harus dapat memaksimalkan perannya. Titik awal dapat dilakukan dengan menyepakati bahwa sejarah perang akan sumber daya perdagangan di kawasan ini beserta jalur-jalur laut strategisnya bukanlah cerita indah dongeng anak-anak, tetapi cerita tentang bagaimana kedaulatan dan kehormatan negara harus dijaga dengan segenap tenaga, darah dan airmata. Titik kedua, adalah dengan membalikkan pengertian MEF<sup>10</sup> yang telah dijadikan landasan pembangunan kekuatan postur pertahanan Indonesia selama 14 tahun terakhir ini menjadi MEF dalam pengertian *maximum essential forces* yang dibutuhkan Indonesia untuk dapat mencapai titik ketiga, yaitu TNI AL dan TNI AU yang mampu mandiri dan juga terlibat dalam keturut sertaannya membangun kerja sama keamanan maritim dan udara kawasan dengan kekuatan yang dapat memberikan dampak magnitudinal pada

---

<sup>9</sup> Herman Kahn, *On Thermonuclear War*, (Princeton: Princeton University Press, 1960).

<sup>10</sup> *Minimum Essential Force*, Komponen Utama, (Jakarta: Kemhan, 2010).

terwujudnya sebuah arsitektur keseimbangan regional yang sesungguhnya. Mengingat luas perairan Indonesia yang meliputi 3 juta km perairan Zona Ekonomi Eksklusif dan 3 juta km perairan wilayah dan kepulauan, maka setiap saat diperlukan 15 kapal *fregat* untuk berpatroli di ZEE dan 60 kapal patroli lepas pantai untuk berpatroli di perairan wilayah dan kepulauan. Secara teori, berdasarkan aksi radiusnya dan jangkauan peralatan deteksinya satu Kapal *Fregat* dapat mengawasi laut seluas 200.000 km<sup>2</sup>, sedangkan satu kapal patroli lepas pantai milik TNI AL saat ini tidak memerlukan persenjataan yang canggih, juga tidak memerlukan standar militer yang tinggi, karena yang diperlukan adalah kuantitas agar setiap saat mampu hadir di seluruh perairan nusantara, agar kekayaan laut kita dan kedaulatan wilayah kita aman. Hadir di laut (*Presence at Sea*) adalah kemampuan minimal yang diperlukan suatu Angkatan Laut.

Sebagaimana Horat pernah berkata : *Nil Volentibus Arduum*, bagi yang berusaha tidak ada sesuatu yang sulit, maka jika mau berusaha, Indonesia jelas mampu memaksimalkan perannya dalam langkah membangun stabilitas keamanan kawasan dengan kekuatan maritim dan dirgantara yang mampu menaklukkan segala bentuk ancaman terhadap NKRI tercinta.

## Daftar Pustaka

- Budiono. 2012. "Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Saatnya Modernisasi Alutsista TNI". *Wira Magazine*. Vol. 39.
- Bakrie, C.R. 2012. "2020 Maritime War Theater and Force Development for Indonesia New Fleets". *Wira Magazine*, Ministry of Defense RI.
- Buntoro, Kresno dan Rajab Silitonga. 2012. *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Prospek dan Kendala*. Jakarta: Sekolah Staf dan Komando TNI AL.
- Beishline, John Robert. 1950. *Military Management for National Defense*. USA : Prentice Hall.
- Dahuri, Rokhmin. 2005. *Kebijakan Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kliman, Daniel & Abe Denmark. 2011. "How to Get South Asia Right", *Diplomat*, dalam <http://thediplomat.com/2011/02/02/how-to-get-southeast-asia-right/>, 2 Februari 2011.
- Kemhan RI. 2007. *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta : Kemhan.
- Kahn, Herman. 1960. *On Thermonuclear War*. Princeton: Princeton University Press.
- Menhan RI. 2012. "Pertemuan ADMM ke 6 di Kamboja, *Majalah Wira*, Vol.36 No. 20, Mei – Juni.
- Santoso, P. 2012."South China Sea Dispute in the Middle of Strategic Competition between the United States and China". *Wira Magazine*. Ministry of Defense RI.
- Than Mya & Carolyn Gates. 2001. (eds). *ASEAN Enlargement: Impacts and Implications*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*.